



Media: Radar

Hari: Rabu

Tanggal: 05 Februari 2025

Halaman: 2

PR Wali Kota Baru Atasi RTLH

1.627 Rumah Tidak Layak Huni di Jogja Masih Belum Tertangani

JOGJA - Meski menyandang status sebagai kawasan metropolitan, Kota Jogja masih menghadapi persoalan serius dalam penyediaan hunian yang layak.

Hingga akhir 2024, ribuan rumah tidak layak huni (RTLH) masih belum tertangani. Hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi wali kota yang baru.

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas PUPKP Kota Jogja Sigit Setiawan mengatakan, per 31 Desember 2024 masih ada 1.627 RTLH yang belum tertangani.

"Jumlahnya tersebar merata di seluruh kemantren," katanya saat dikonfirmasi Selasa (4/2).

Adapun dari jumlah tersebut terbanyak berada di Tegalrejo dengan total 320 RTLH. Disusul Jetis 259 RTLH, Gedongtengen 183 RTLH, Wirobrajan 128 RTLH, Mergangsan 131 RTLH, Kraton 121 RTLH, Umbulharjo 113 RTLH, dan Kotagede 107 RTLH.

Kemudian untuk kemantren lain seperti Pakualaman tercatat ada 78 RTLH, Mantriweron 67 RTLH, Gondokusuman 57 RTLH, Danurejan 30 RTLH, Gondomanan 18 RTLH. Serta yang paling sedikit ada di Kemantren Ngampilan dengan jumlah RTLH yang tinggal tersisa 15 RTLH.

"Hingga tanggal 31 desember 2024

ada 1.627 yang belum tertangani," ujarnya.

Sebagai upaya mengurangi jumlah RTLH 2025, Pemkot telah menyiapkan langkah. Pada tahun ini, telah merencanakan program rehabilitasi pada 60 RTLH. Meliputi peningkatan 51 RTLH di 11 kemantren yang dibiayai APBD Kota Jogja sebesar Rp 1,075 miliar. Serta pembangunan baru 9 RTLH di 2 kemantren dengan total biaya Rp 585 juta yang dibiayai lewat APBD DIJ.

Pun terkait dengan target pengentasan seluruh RTLH di Kota Jogja, Sigit mengupayakan tahun ini dengan koordinasi bersama kepala daerah terpilih.

"Baru akan kami susun ketika sudah ada walikota baru," jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Jogja terpilih Hasto Wardoyo mengatakan, rehabilitasi RTLH merupakan salah satu program prioritasnya sebagai kepala daerah. Bahkan juga sudah diterapkan selama menjadi bupati Kulon Progo dan akan diduplikasi di Kota Jogja.

Khusus wilayah Kota Jogja, Hasto bakal mengedepankan konsep Segoro Amarto yang merupakan akronim dari Semangat Gotong Rotong Agawe Majune Ngajogjakarta. Sehingga gotong royong antarmasyarakat pun akan dikedepankan dalam menanggulangi permasalahan RTLH di Kota Jogja.

"Saya ingin membuktikan gotong royong di Kota Jogja masih ada dan semboyan Segoro Amarto masih relevan," tegasnya. (inu/wia/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005